

**UPAYA BANGLADESH RURAL ADVANCEMENT COMMITTEE  
(BRAC) DALAM MELAKUKAN ADVOKASI KEBIJAKAN  
TENTANG PERNIKAHAN ANAK DI BANGLADESH  
2011-2015**

Oleh: Gerry Dwi Oktarani

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

*E-mail: [gerry.dwi.2012@fisipol.umy.ac.id](mailto:gerry.dwi.2012@fisipol.umy.ac.id)*

*Abstract*

*This paper aims to describe how the BRAC's efforts in advocating policy of child marriage in Bangladesh. Bangladesh has the fourth-highest rate of child marriage in the world. Lack of proper implementation and monitoring of existing policies and laws are the main reasons behind child marriage. This condition encourages NGOs to form the advocacy alliances which aimed at pressuring the government in terms of dealing with such cases, one of which is BRAC. BRAC with the alliance make some efforts to advocate policies to influence the government policy regarding child marriage.*

*Keywords: Child Marriage, Transnational Advocacy Networks, NGOs, BRAC, Government of Bangladesh.*

Abstrak

*Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana upaya BRAC dalam melakukan advokasi kebijakan tentang pernikahan anak di Bangladesh. Bangladesh merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kasus pernikahan anak tertinggi di dunia. Lemahnya penerapan dan pengawasan kebijakan dan hukum menjadi salah satu penyebab terjadi pernikahan anak. Hal ini mendorong NGO-NGO untuk membentuk aliansi advokasi yang bertujuan mendesak pemerintah dalam hal menangani kasus tersebut, yang salah satunya adalah BRAC. BRAC bersama aliansi yang dibentuknya berupaya melakukan advokasi kebijakan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah mengenai pernikahan anak.*

*Kata Kunci: Pernikahan Anak, Transnational Advocacy Networks, NGO, BRAC, Pemerintah Bangladesh*

## **Pendahuluan**

Bangladesh merupakan negara peringkat keempat tertinggi pernikahan anak di dunia, setelah Niger, Republik Afrika Tengah, dan Chad (World Vision, 2015). Peringkat ini dibuktikan melalui data dari UNICEF yang menunjukkan bahwa pada tahun 2005-2013, sekitar 29% perempuan Bangladesh menikah sebelum usia 15 tahun dan 65% yang menikah sebelum usia 18 tahun. Jumlah tersebut dikategorikan sebagai angka yang sangat tinggi. Hal ini sangat memprihatinkan karena tidak hanya sebagai negara peringkat empat tertinggi di dunia, tetapi Bangladesh menjadi negara yang memiliki tingkat kasus pernikahan anak tertinggi di wilayah regionalnya, Asia Selatan.

Maraknya pernikahan anak di Bangladesh memunculkan pergerakan masyarakat yang menyadari perlu adanya penanganan terhadap kasus ini untuk terjun langsung melalui kegiatan yang berhubungan dengan upaya mengurangi tingkat kasus pernikahan anak dan menekan pemerintah Bangladesh terkait kebijakan-kebijakannya dalam menangani kasus pernikahan anak di Bangladesh. Pergerakan masyarakat ini dimulai dari para aktivis lembaga kemasyarakatan non-pemerintah yang dikenal dengan *Non-Governmental Organizations* (NGO). Salah satu NGO yang berperan andil dalam upaya menangani kasus pernikahan anak di Bangladesh adalah BRAC (*Bangladesh Rural Advancement Committee*). BRAC merupakan salah satu NGO yang lahir di Bangladesh sejak tahun 1972 dan telah melakukan kerjasama dengan NGO-NGO lokal dan non-lokal dalam hal menangani pernikahan anak di negara tersebut melalui sebuah cara yang disebut sebagai advokasi kebijakan.

## **Dinamika Perkembangan BRAC di Bangladesh**

BRAC mulanya dikenal dengan *Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee*, namun mengalami perubahan menjadi *Bangladesh Rural Advancement Committee*.

BRAC adalah sebuah organisasi pembangunan internasional yang lahir dan terbentuk di Bangladesh. Didirikan oleh Fazle Hasan Abed pada tahun 1972 di desa Sunamganj, Shallah Upazillah, sebagai sebuah proyek pertolongan dan rehabilitasi skala kecil untuk menolong korban perang pembebasan Bangladesh pada tahun 1971. Sebagai upaya pertolongan, BRAC telah membangun kembali 14.000 rumah dan membuat beberapa ratus kapal untuk para nelayan dalam kurun waktu sembilan bulan. Selain itu, BRAC juga membuka pusat kesehatan dan beberapa pelayanan penting lainnya. Ketika tahap pertama proyek pertolongan selesai, BRAC mulai berpaling ke arah tujuan pembangunan jangka panjang dan fokus kepada pemberdayaan masyarakat miskin dan tidak memiliki lahan pemukiman, terutama anak-anak dan perempuan.

Sejak berdirinya, BRAC telah melakukan berbagai program yang mewakili visinya sebagai sebuah organisasi internasional. Pada tahun 1973, BRAC membuat Program Pembangunan Desa Terpadu (*Integrated Rural Development Programme*) yaitu sebuah proyek berkelanjutan yang memberikan dukungan pertanian, pendidikan keaksaraan, dan perawatan kesehatan untuk seluruh masyarakat di 200 desa (Shigetomi, 2002). BRAC mulai memasuki bidang kesehatan pada tahun 1979 dengan mendirikan *Oral Therapy Extension Programme* (OTEP), yaitu sebuah kampanye untuk memerangi diare, mengingat diare merupakan penyebab utama tingkat kematian anak yang tinggi di Bangladesh. Selanjutnya, pada tahun 1986 BRAC memulai Program Pembangunan Pedesaan yang menggabungkan empat kegiatan utama, yaitu pembangunan institusi termasuk pendidikan fungsional dan pelatihan, operasi kredit, pendapatan dan lapangan kerja, dan dukungan program pelayanan. Hingga sampai saat ini BRAC masih aktif menjalankan program-program dan inovasi barunya untuk menjalankan visi organisasinya. Bahkan di tahun 2013, BRAC menjadi NGO peringkat 1 dari 100 TOP NGO di dunia berdasarkan penilaian *The Global Journal*, sebuah majalah yang meliputi isu pemerintahan global yang berbasis di Jenewa (The Global Journal, 2013). Sepanjang perjalanan keorganisasiannya, BRAC telah menjalin kerjasama dengan banyak NGO, sektor swasta, lembaga pemerintah Bangladesh dan lembaga pemerintah luar negeri.

## **Upaya BRAC dalam Melakukan Advokasi Kebijakan tentang Pernikahan Anak**

Dalam upaya melakukan advokasi kebijakan tersebut, BRAC telah melaksanakan beberapa langkah upaya yang sejalan dengan teori organisasi internasional serta konsep *Transnational Advocacy Network* (TAN). Berikut adalah upaya-upaya BRAC dalam melakukan advokasi kebijakan tentang pernikahan anak di Bangladesh.

### ***Membentuk Aliansi Advokasi Girls Not Brides Bangladesh (GNBB)***

Terbentuknya *Girls Not Brides Bangladesh* (GNBB) bermula dari munculnya *Girls Not Brides* (GNB). GNB merupakan sebuah jaringan kerjasama global yang bertujuan untuk melawan pernikahan anak. Mulanya jaringan ini terdiri beranggotakan 286 organisasi yang tersebar di 53 negara di dunia. Seiring berjalannya waktu keanggotaan jaringan ini terus meningkat hingga saat ini menjadi lebih dari 550 organisasi masyarakat yang tersebar di hampir 70 negara di dunia mencakup wilayah regional Afrika, Asia, Timur Tengah, Eropa dan Amerika. Sebagai jaringan yang kuat, GNB berupaya untuk membawa masalah pernikahan anak ke dalam perhatian global dan membangun kesadaran seluruh masyarakat tentang apa yang harus dilakukan untuk mengakhiri pernikahan anak serta memperbaiki hukum, kebijakan dan program yang akan mengubah kehidupan jutaan perempuan di dunia.

BRAC adalah satu anggota dari GNB yang aktif dalam mengikuti kegiatan dan forum yang diadakan GNB. Hal ini mengingat tujuan dari terbentuknya GNB sejalan dengan apa yang menjadi tujuan BRAC sejak organisasi ini berdiri. Melalui GNB, BRAC berupaya membentuk aliansi lokal di Bangladesh yang bertujuan untuk mengatasi kasus pernikahan anak di Bangladesh. Sehingga pada tahun 2013, terbentuklah sebuah aliansi *Girls Not Brides Bangladesh* yang beranggotakan 12 NGO lokal dimana BRAC merupakan pemimpin dari aliansi ini. Adapun anggota dari aliansi GNB Bangladesh ini adalah sebagai berikut:

- 1) BLAST (Bangladesh Legal Aid and Service Trust)

- 2) CARE Bangladesh
- 3) Family Planning Association of Bangladesh
- 4) International Centre of Diarrhoeal Disease Research Bangladesh (icddr,b)
- 5) Marie Stops Bangladesh
- 6) National Girl Child Advocacy Forum
- 7) Plan Bangladesh
- 8) Population Council
- 9) White Ribbon Campaign
- 10) World Vision
- 11) Youth Forum Promoting Access to Development

Untuk mengakhiri pernikahan anak, GNB memiliki cara sendiri yang digunakan sebagai pedoman bagi anggotanya. Menurut GNB, untuk mengakhiri pernikahan anak membutuhkan upaya melalui semua sektor dan tingkatan. Sebelum melakukan upaya pencegahan, harus ada pemahaman tentang penyebab pernikahan anak. GNB mengembangkan Teori Perubahan (*Theory of Change*) untuk menggambarkan berbagai pendekatan yang diperlukan dalam upaya mengakhiri pernikahan anak, dan secara krusial menekankan bahwa setiap orang memiliki peran untuk ikut bermain. Teori Perubahan juga menekankan pentingnya jangka panjang, intervensi berkelanjutan yang terkoordinasi, sumber daya yang baik, dan hasil pembelajaran bersama. Berdasarkan Teori Perubahan, GNB membagi upayanya dalam mengakhiri pernikahan anak ke dalam empat tahapan, yaitu memberdayakan perempuan, memobilisasi keluarga dan masyarakat, memberikan pelayanan, serta membangun dan menerapkan hukum dan kebijakan (Girls Not Brides, n.d.).

### ***Mengadakan Program Pemberdayaan Masyarakat***

Di samping memperluas jaringan dengan membentuk aliansi, BRAC melakukan juga melakukan upaya pencegahan pernikahan anak melalui program-program yang diterapkan kepada masyarakat yang beresiko terhadap

penyelenggaraan pernikahan anak. Program-program yang diselenggarakan oleh BRAC ini lebih ditujukan kepada kaum perempuan mengingat anak perempuan merupakan korban utama dalam kasus pernikahan anak. Adapun program-program BRAC yang berkaitan dengan pernikahan anak adalah sebagai berikut (BRAC, 2016).

1. POSITION (*Poribortito Jiboner Sandhane – to enhance positive life*)

Program POSITION ini diluncurkan di Gazipur dan Gaibandha pada tahun 2011 dengan pelajaran dari GQAL (*Gender Quality Action Learning*) – sebuah program BRAC yang diluncurkan pada tahun 1995. Tujuan utama dari program POSITION adalah untuk menciptakan kesetaraan gender dan meningkatkan hubungan gender dalam keluarga dan masyarakat pada umumnya, serta untuk memerangi diskriminasi berdasarkan gender dan kekerasan terhadap anak perempuan dan perempuan. Aksi ini diperluas dengan tujuan untuk memberdayakan para perempuan untuk aktif terlibat dalam mewujudkan hak-hak dan kesetaraan mereka melalui peningkatan pengambilan keputusan rumah tangga, mengurangi kekerasan terhadap perempuan, menunjukkan peningkatan pengetahuan, sikap dan praktek, dan menempatkan fokus yang lebih pada keterlibatan pemuda dan pelecehan seksual di daerah pedesaan. Program ini menempatkan target kepada 390.000 rumah tangga diantara 1.950.000 populasi di 40 serikat dari delapan daerah. Langka yang baru berfokus pada pembentukan dan fungsi relawan perubahan kebudayaan gender dan memperkuat kesadaran, mobilitas, partisipasi, hak dan mengubah ideologi kelompok.

2. *Communication for Development (C4D)*

Sejak Desember 2010, advokasi untuk perubahan sosial dan kesetaraan gender dan keanekaragaman, bersama-sama melaksanakan proyek, 'Komunikasi Pembangunan: Mempromosikan Perilaku Berkelanjutan dan Pembangunan Sosial Perubahan' di Ukhiya dan Teknaf kecamatan di bawah kabupaten Bazaar Cox melalui kemitraan dengan UNICEF. Proyek ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi secara terpadu dan memastikan anggota masyarakat

yang berpendidikan, dan terus berlatih menjaga kunci penyelamatan hidup dan kebiasaan menjaga kesehatan, kebersihan, pendidikan, dan perlindungan anak.

### 3. *Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR)*

Program SRHR ini dimulai dari Juli 2012 dengan konsorsium dari enam mitra kerja seperti Oxfam Novib, BNPS, Campe, FPAB, hasab dan BRAC. Ini adalah program berbasis kampanye yang didanai oleh Oxfam Novib, yang bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap penurunan yang signifikan dari jumlah gadis remaja yang menderita kematian ibu yang tidak terhindarkan dan pencegahan terhadap bahaya dari kesehatan seksual dan reproduksi lainnya bagi remaja perempuan dan laki-laki. Meningkatnya jumlah penggunaan alat kontrasepsi pada remaja laki-laki dan perempuan, maka kehamilan menjadi tertunda dan kematian ibu menurun.

### 4. *Violence Against Woman (VAW)*

Program ini dimulai sejak September 2012 di Khulna dengan konsorsium 'Kita Bisa dan Langkah menuju Pembangunan'. Proyek peningkatan kapasitas ini, dengan adanya kontribusi dari United Nation Trust Fund (UNTF), bertujuan untuk meningkatkan pencegahan pelecehan seksual di tempat umum.

## ***Membangun Kerjasama Strategis dengan Pemerintah Australia dan Inggris***

### 1. Pemerintah Australia

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa BRAC telah menjalin hubungan kerjasama dengan pemerintah Australia melalui DFAT, yaitu sebuah lembaga departemen milik pemerintah Australia yang mewakili upaya Pemerintah Australia untuk mempromosikan dan melindungi kepentingan Australia dan masyarakat Australia secara internasional, termasuk kepentingan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Dukungan Australia ke Bangladesh dibangun berdasarkan keberhasilan dan pelajaran dari 40 tahun kerjasama pembangunan bilateral. Dukungan ini difokuskan untuk membantu Bangladesh mengembangkan sumber daya manusia dan mengatasi kemiskinan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

DFAT bekerja sama dengan pemerintah untuk memperkuat sistem nasional dalam pemberian layanan untuk menyediakan termiskin dan paling rentan, serta dengan mitra non-pemerintah untuk memberikan skala besar, kualitas tinggi dan program-program inovatif. Kerjasama ini memiliki fokus yang kuat terhadap gender, pemberdayaan perempuan dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan peluang ekonomi bagi perempuan (BRAC, 2015). Adapun dukungan dari pemerintah Australia kepada BRAC dalam upaya mengatasi pernikahan anak di Bangladesh adalah sebagai berikut.

- a) Meningkatkan kualitas pendidikan dasar formal, dengan fokus pada peningkatan metode pengajaran, penilaian dan hasil belajar.
- b) Memastikan akses yang lebih besar ke sekolah-sekolah untuk anak-anak sangat miskin (terutama perempuan) yang mungkin sebaliknya tidak menerima pendidikan.
- c) Membangun pertahanan dalam masyarakat dengan menyediakan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dan akses pelayanan kepada masyarakat miskin.
- d) Memperkuat efektivitas program pengamanan jaringan sosial nasional.
- e) Bekerja regional untuk mengurangi hambatan perdagangan regional dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi.
- f) Memberikan bantuan kemanusiaan dan kesempatan mendapatkan penghasilan kepada perempuan dan keluarga yang tinggal di daerah terpencil.
- g) Menyediakan kesempatan bagi individu dan lembaga untuk belajar di Australia.

## 2. Pemerintah Inggris

Selain melakukan hubungan kerjasama dengan pemerintah Australia, BRAC juga telah menjalin kerjasama dengan pemerintah Inggris melalui DFID. Pemerintah Inggris memiliki hubungan sejarah yang kuat dalam membantu masyarakat miskin di Bangladesh. Bersama dengan BRAC dan UNICEF, Inggris



telah mengadakan kegiatan '*Girl Summit 2014*', yaitu sebuah forum global yang bertujuan untuk mengatasi pernikahan anak di dunia. Adapun bentuk dukungan lain dari pemerintah Inggris kepada Bangladesh adalah:

- a) Meningkatkan kemajuan terhadap akses pelayanan dasar dan mengurangi kemiskinan, dengan fokus pada daerah tertinggal dan kelompok yang terabaikan, termasuk perempuan, etnis minoritas dan orang-orang cacat.
- b) Membantu mengurangi dan mengelola risiko untuk pengembangan, terutama yang berhubungan dengan pemerintahan dan keamanan, bencana alam dan perubahan iklim, dan ekonomi.
- c) Mendukung pengembangan sektor swasta, pekerjaan dan keterampilan, sebagai dasar untuk pertumbuhan yang lebih berkelanjutan, adil dan tinggi, dan pengembangan dalam jangka panjang.
- d) Menyediakan akses untuk membiayai untuk kelompok orang yang lebih luas.
- e) Meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah dengan membuat pasar bekerja lebih baik bagi masyarakat miskin.
- f) Membantu pemerintah menempatkan sistem manajemen informasi bantuan baru untuk menganalisis sumber daya apa yang tersedia dan bagaimana menggunakannya.

### **Mengadakan Bangladesh *Girl Summit 2014***

Pada bulan Juli 2014, UNICEF dan Pemerintah Inggris mengadakan sebuah pertemuan global yang disebut *Girl Summit 2014*. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas dan memberdayakan gerakan global; membantu mengidentifikasi kegiatan yang mampu mengakhiri pernikahan anak dan bagaimana mengukur kemajuannya; dan advokasi terhadap para pengambil keputusan di tingkat internasional, regional, nasional, dan komunitas untuk mengambil tindakan substantif dalam upaya mengakhiri pernikahan anak dan

memberdayakan perempuan. BRAC adalah salah satu undangan yang ikut menghadiri pertemuan ini. Dalam pertemuan global ini, tidak hanya mengundang pimpinan komunitas, masyarakat sipil, dan sektor swasta, tetapi juga menteri pemerintah dari beberapa negara yang berpotensi terhadap pernikahan anak, termasuk Bangladesh. Perdana Menteri Sheikh Hasina merupakan perwakilan dari Bangladesh yang menghadiri pertemuan tersebut.

Keikutsertaan pemerintah Bangladesh dalam *Girl Summit 2014* yang diadakan oleh pemerintah Inggris di London, telah menghasilkan beberapa komitmen yang juga merupakan rencana nasional pemerintah Bangladesh menyangkut kasus pernikahan anak di Bangladesh. Berikut rencana langkah-langkah pemerintah Bangladesh dalam menangani kasus pernikahan anak (Begum, 2016).

**Tabel 4. 1** Rencana Nasional Pemerintah Bangladesh dalam *Girl Summit 2014* di London

<i>National Plan of Action</i>	By the end of 2014
<i>Revision of 'Child Marriage Restraint Act 1929'</i>	By 2015
<i>No marriage taking place below the age of 15</i>	By 2021
<i>The number of girls getting married between 15 and 18 will be reduced by more than one third</i>	By 2021
<i>Enabling Environment for Child Rights Project under the Ministry of Women and Children Affairs has been implementing intervention on the provision of conditional cash transfer and stipend to continue education and to delay child marriage before 18</i>	By 2041
<i>National Forum for Social Norm Change down to the community level</i>	Ongoing
<i>Actively engage the civil society, media, communities, young people, businesses and other actors in a Social Responsibility Compact</i>	Ongoing

Bersama dengan perwakilan pemerintah dari 47 negara, pemerintah Bangladesh ikut menandatangani perjanjian dari hasil *Girl Summit 2014*. Beberapa bulan setelah diadakannya *Girl Summit 2014* ini, BRAC dan Menteri Urusan Perempuan dan Anak (MOWCA) yang didukung oleh pemerintah Inggris mengadakan *Bangladesh Girl Summit 2014*. Di dalam *Bangladesh Girl Summit 2014*, Bangladesh menyelesaikan Rencana Aksi Nasional untuk mengakhiri pernikahan anak bersama dengan mitra pembangunan. Pemerintah juga telah menyatakan bahwa 29 September sebagai Hari Pencegahan Pernikahan Anak di Bangladesh. Selain itu, dalam kegiatan ini juga sebagai suatu bentuk dukungan, Pemerintah Inggris memberikan pidato yang ditujukan kepada pemerintah Bangladesh (UK Government, 2014). Dalam pidato ini, selain memberikan dukungan terselenggarakannya *Bangladesh Girls Summit 2014*, pemerintah Inggris juga menekan pemerintah Bangladesh untuk segera menerapkan *National Action Plan* yang telah disusun sehingga dapat memberikan perkembangan terkait upaya mengatasi kasus pernikahan anak di Bangladesh.

Pasca diadakannya *Girl Summit 2014*, pemerintah Bangladesh mulai mengambil langkah sebagai upaya mengurangi kasus pernikahan anak di Bangladesh. Pada tingkat nasional pemerintah Bangladesh mengumumkan rencana perubahan CMRA 1929 menjadi CMRA 2014 yang diikuti oleh perubahan beberapa isi dari undang-undang tersebut. CMRA 2014 akan menambah hukuman untuk pelanggaran menjadi dari 2 bulan sampai 2 tahun penjara dengan denda yang lebih berat. Akan tetapi, perubahan lainnya adalah akan diturunkannya batas usia pernikahan anak perempuan dari 18 menjadi 16 tahun. Menurut BRAC, langkah pemerintah ini merupakan langkah yang salah dan berlawanan dengan komitmen yang telah disampaikan oleh Perdana Menteri Bangladesh pada *Girl Summit 2014*.

Menanggapi rencana pemerintah Bangladesh untuk menurunkan batas usia pernikahan anak melalui dalam CMRA 2014, BRAC bersama dengan aliansinya GNB Bangladesh melakukan beberapa upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tersebut. Adapun upaya yang dilakukan adalah:

1. Mengirimkan surat melalui SDG (*Sustainable Development Goals*) untuk Perdana Menteri Bangladesh, Menteri Urusan Peranan Perempuan, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, dan Perwakilan Tetap Pemerintah Bangladesh di PBB.
2. Memulai pergerakan dalam melakukan protes terhadap usulan pemerintah Bangladesh untuk menurunkan batas usia pernikahan anak secara kolektif melalui konferensi pers, pernyataan, *human chain*, seminar, dan lain sebagainya.
3. Melakukan lobi tingkat tinggi melalui pertemuan dengan Menteri Keuangan.
4. Mengadakan *sharing meeting* tingkat nasional dengan pemerintah Bangladesh, para pencatat pernikahan, CSOs (*Central Statistical Offices*), dan para pemuda.
5. Mengadakan konsultasi tingkat nasional mengenai draft *Child Marriage Restraint Act (CMRA) 2014* dan menyusun rekomendasi.
6. Melakukan lobi tingkat global, seperti pencaangan surat terbuka dari Sekretaris Jenderal PBB terdahulu, Kofi Annan, sebagai bagian dari kelompok senior GNB agar mempengaruhi pemerintah Bangladesh untuk tidak menurunkan batas usia pernikahan anak di Bangladesh.
7. Melakukan advokasi global dengan memberi komentar terhadap SDG yang telah diusulkan untuk mendukung mempertahankan target spesifik CEFM (*Child, Early and Forced Marriage*) berdasarkan goal ke 5 – “*Achieved gender equality and empower all women and girls*”.
8. Meninjau kembali National Action Plan on Child Marriage.
9. Ikut berkontribusi kepada Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) dalam laporannya di bagian prevalensi, dampak, langkah yang diambil, dan strategi yang efektif untuk melawan pernikahan anak.

Upaya GNB dalam melakukan lobi kepada Kofi Annan agar mengirimkan surat terbuka kepada pemerintah Bangladesh yang kemudian langsung di tanggapi oleh Sekretaris Jenderal PBB ini (*Girls Not Brides*, 2014). Dalam surat tersebut,

Kofi Annan menekankan kepada pemerintah Bangladesh untuk tetap menjadikan usia 18 tahun sebagai batas usia minimal pernikahan bagi perempuan di Bangladesh. Kofi Annan menganggap bahwa pemerintah Bangladesh telah melakukan langkah yang salah melalui rencananya untuk menurunkan batas minimal usia pernikahan. Selain itu, ia juga menganggap bahwa pernikahan anak merupakan permasalahan hak asasi manusia yang besar dan harus dituntaskan karena hal ini tidak hanya akan berpengaruh pada anak-anak, melainkan juga keluarga dan komunitas masyarakat lainnya.

Dari advokasi kebijakan yang telah dilakukan oleh BRAC setidaknya dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah Bangladesh dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan anak di negara tersebut. Apalagi di luar dari BRAC dan aliansinya masih banyak NGO-NGO lain yang ikut menentang kebijakan pemerintah tersebut. Contohnya pada bulan Oktober 2015, *Center for Productive Rights* mengeluarkan sebuah siaran pers bahwa Komite PBB telah menyerukan kepada pemerintah Bangladesh untuk mengakhiri pernikahan anak di Bangladesh. Tindakan Komite PBB ini adalah sebagai tanggapan terhadap surat yang dikirimkan oleh *Center for Productive Rights* yang juga merupakan sebuah NGO (Center for Productive Rights, 2015). Meskipun tidak tergabung dalam sebuah jaringan advokasi, NGO-NGO ini memiliki peran untuk memperbaiki kebijakan pemerintah. Bagaimanapun, NGO merupakan sekumpulan dari masyarakat yang seharusnya dapat ambil andil dalam proses kebijakan karena hasil dari kebijakan sebuah negara pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakatnya apalagi Bangladesh merupakan negara yang menganut demokrasi.

Setelah melalui waktu yang cukup panjang dan mendapatkan banyak desakan dari NGO-NGO, bahkan Komite PBB, sampai saat ini pemerintah Bangladesh belum benar-benar memutuskan kebijakan mengenai batas minimal usia pernikahan anak di Bangladesh. MOWCA Bangladesh telah mengusulkan untuk menjaga usia minimal pernikahan anak perempuan adalah 18 tahun, tetapi dengan pilihan menurunkan ke 16 tahun jika di bawah 'keadaan khusus' dalam sub pasal draft CMRA 2014 (Rashid, 2015). Penjelasan mengenai 'keadaan khusus'

adalah tentang menjaga usia pernikahan yang sah untuk anak perempuan pada 16 tahun dalam kasus-kasus ketika seorang gadis kawin lari dengan seorang pria dan menolak untuk kembali atau menjadi hamil sebelum menikah. Usulan ini tetap saja banyak menuai protes dari para aktivis hak-hak perempuan dan organisasi-organisasi. Hasil dari keputusan dari pemerintah Bangladesh merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak yang peduli dengan kondisi kasus pernikahan anak di Bangladesh. Dengan adanya banyak tuntutan dan masukan dari berbagai pihak ini, pemerintah Bangladesh diharapkan dapat memberikan keputusan yang bijaksana. Seiring menunggu keputusan dari pemerintah, aktivis-aktivis NGO tetap aktif melaksanakan program-program mereka dalam upaya menangani kasus pernikahan anak di Bangladesh, terutama program-program yang ditujukan kepada masyarakat.

## **Kesimpulan**

Dalam upaya mengatasi kasus pernikahan di Bangladesh, pemerintah telah memiliki beberapa undang-undang dan perjanjian yang berkaitan dengan pernikahan anak. Namun, kebijakan yang telah ada ini tidak diterapkan secara tegas oleh pemerintah Bangladesh, sehingga pernikahan anak masih saja terus menjadi masalah yang epidemik di Bangladesh. Oleh karena itu, BRAC sebagai salah satu NGO terbesar di Bangladesh, berusaha untuk mencari solusi dalam upaya menangani kasus pernikahan anak yang marak terjadi di negara tersebut yaitu dengan melakukan advokasi kebijakan. Dalam proses menjalankan advokasi kebijakan BRAC telah melakukan berbagai upaya-upaya agar tujuan advokasinya tercapai.

Upaya yang dilakukan oleh BRAC seperti, mengumpulkan informasi melalui riset dan program-program yang berkaitan dengan pernikahan anak sebagai bahan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi aktor-aktor lain dalam memberikan dukungan terhadap upaya BRAC. Selanjutnya, BRAC bergabung dalam kerjasama global melawan pernikahan anak dan mulai membentuk aliansi

advokasi lokal melalui kegiatan dan kampanye yang berhubungan dengan pemberantasan praktek pernikahan anak. BRAC juga melakukan lobi kepada pihak-pihak yang memiliki kekuatan untuk mengubah kebijakan. Untuk menyempurnakan upayanya, BRAC menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas komitmen-komitmen yang telah dibuat untuk menegakkan hukum yang dapat mengatasi kasus pernikahan anak yang marak di Bangladesh.

## Referensi

### BUKU

- Archer, C. (1983). *International Organization*. London: Allen & Unwin Ltd.
- Asmarita. (2015). Peran UNICEF Dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur Di India. *JOM FISIP Vol.2 No.2*, 1-5.
- Azizah, N. (2013). *Advokasi Kuota Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Baxter, C., Malik, Y. K., Kennedy, C. H., & Oberst, R. C. (1986). *Government and Politics in South Asia*. Westview Press.
- Bangladesh, T. G. (2006, October). United Nations Study on Violence Against Children. (U. Nations, Interviewer)
- Bennet, L. (1995). *International Organization, Principle and Issue*. Eaglewood, New Jersey: Prentice Hall Inc.
- Chowdury, A., & Cash, R. A. (1996). *A Simple Solution: Teaching Millions to Treat Diarrhoea at Home*. Dhaka, Bangladesh: University Press.
- Clark, J. (1995). *NGO dan Pembangunan Demokrasi*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Dougherty, J. E., & Jr., R. L. (1990). *Contending Theories of International Relations : A Comprehensive Survey*. Boston: Pearson.
- Grolier International. (1989). *Negara dan Bangsa*. Jakarta: Grolier International, Inc.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (2003). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto: Oxford University Press.
- Keck, M. E., & Sikkink, K. (1998). *Activists Beyond Borders*. Ithaca, United States: Cornell University Press.
- Lasswell, H. (1956). *The Decision Process*. Collage Park: University of Marland Press.

- Shigetomi, S. (2002). *The State and NGOs Perspective from Asia*. Tokyo: Institute of Southeast Asian Studies.
- Wendts, A., Levy, J. S., & Little, R. (2014). *Metodologi Hubungan Internasional : Perdebatan Paradigmatik dan Pendekatan Alternatif*. Malang: Intrans Publishing.
- Winarno, B. (2013). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Jakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- Tomatimasang, R., Fakhri, M., & Raharjo, t. (2000). *Merubah Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Read Books.

## **JURNAL**

- Begum, S. (2016). Ending Early and Forced Marriage: Bangladesh and UK Perspective. 1-15.
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2009). Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya. *Sari Pediatri, Vol. 11, No. 2*, 136-140.
- Ferdousi, N. (2013). Child Marriage in Bangladesh: Socio-legal analysis. *International Journal of Sociology and Anthropology*, 1-7.
- Blomgren, L. (2013). *Child Marriage in Bangladesh: Causes, Consequences, and Legal Framework*. Avon Global Center for Women and Justice.
- Gemmil, B., & Bamidele-Izu, A. (2002). The Role of NGOs and Civil Society in Global Environmental Governance. *Global Environmental Governance : Options & Opportunities*, 1-24.
- Gerraud, P. (2004). Agenda/Émergence. In L. Boussaguet, S. Jacquot, & P. Ravinet, *Dictionnaire des politiques publiques* (pp. 49-56). Paris: Presses de la Fondation nationale des sciences politiques.
- Hasan, R., & Ahmed, F. (2008). Structural Social Work and the Compatibility of NGO Approaches: a case analysis of Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC). *International Journal of Social Welfare*, 179.
- Pramono, S., & Purwono, A. (2010). Konstruktivisme Dalam Studi Hubungan Internasional: Gagasan dan Posisi Teoritik. *Vol 7, No 2*, 14-20.

## **WEBSITE**

- BRAC. (2016). *Programme Intervention*. Retrieved from: BRAC <http://www.brac.net/gender-justice-diversity/> (Diakses pada 27 April 2016)
- BRAC. (2015). *Strategic Partnership Arrangement*. Retrieved from BRAC: <http://www.spa.brac.net> (Diakses pada 10 Maret 2016)
- Center for Productive Rights. (2015, Oktober 13). *U.N. Committee Call on Bangladesh to End Child Marriage and Adress Adolescent Helath*.



Retrieved from Center for Productive Rights:  
<http://www.reproductiverights.org/press-room/un-committee-calls-on-bangladesh-to-end-child-marriage-and-address-adolescent-health> (Diakses pada 22 Februari 2016)

Girls Not Brides. (2014, November 6). *"Lowering the marriage age in Bangladesh: a step in the wrong direction" writes Kofi Annan*. Retrieved from Girls Not Brides: <http://www.girlsnotbrides.org/loweringmarriageagestepwrong-directionkofiannanwarnsbangladesh/> (Diakses pada 21 Desember 2015)

Girls Not Brides. (n.d.). *Theory of Change*. Retrieved from Girls Not Brides: <http://www.girlsnotbrides.org/child-marriage-theory-of-change/> (Diakses pada 17 Februari 2016)

Mephram, D. (2015, Juni 16). *Is David Cameron Serious About Curbing Child Marriage?* Retrieved from Open Democracy UK: <https://www.opendemocracy.net/david-mephram/is-david-cameron-serious-about-curbing-child-marriage> (Diakses pada 27 Desember 2015)

Mohosinul, K. (2015, Desember 10). *Cabinet Okays Child Marriage Restraint Age 2014*. Retrieved from Dhaka Tribune: <http://www.dhakatribune.com> (Diakses pada 21 Oktober 2015)

Rashid, R. B. (2015, December 17). *Legal marriageable age for girls still under review*. Retrieved from UNICEF Bangladesh Media Center: [http://www.unicef.org/bangladesh/media\\_9756.htm](http://www.unicef.org/bangladesh/media_9756.htm) (Diakses pada 27 Desember 2015)

Save The Children. (2014, September 22). *Plan International and Save The Children on Behalf of Child Rights Advocacy Coalition Reinforce Calls to Keep the Minimum Marriageable Age At 18 For Girls*. Retrieved from Save The Children Bangladesh: <https://bangladesh.savethechildren.net/news/planinternationalandsave-childrenbehalfchildrightsadvocacycoalitionreinforcecalls> (Diakses pada 21 Oktober 2015)

The Global Journal. (2013). *The TOP 100 NGOs 2013*. Retrieved from The Global Journal: <http://www.theglobaljournal.net> (Diakses pada 20 Maret 2016)

UK Government. (2014). *Speech Bangladesh Girl Summit 2014*. Retrieved from UK Government: <http://www.gov.uk/> (Diakses pada 15 Mei 2016)

## **OTHERS**

Hafiza, S. (2015). *BRAC's Experience in Ending Child Marriage*. Dhaka, Bangladesh: Girls Not Brides Bangladesh Alliance.

Human Right Watch. (2015). *Marry Before Your House is Swept Away*. Human Right Watch.

- Human Rights Watch. (2015). *Country Summary Bangladesh*. Bangladesh: HRW.
- ICRW. (2006). *Child Marriage Around The World*. New Delhi: ICRW.
- Lasswell, H. (1956). *The Decission Process*. Collage Park: University of Marland Press.
- Pathey, P. (2012-2013). *Monitoring the Situation of Children and Woman*. Bangladesh: Multiple Indicator Cluster Survey.
- PROCASUR and the Ford Foundation. (n.d.). Successful Innovations in Rural Microfinance in Asia. *Host Cases Case #7 BRAC Bangladesh*, 1-2, 13-16.
- Putrianti, H. (2013). *Upaya Children's Organization of Southeast Asia (COSA) dalam Mengatasi Human Trafficking di Thailand 2008-2012*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Srivastava, L. (n.d.). BRAC: A Pioneering Bangladesh Human Service Organization (1972-2009).
- The World Bank. (2007). *Bangladesh: Strategy for Sustained Growth*. Dhaka: Document of the World Bank.
- UNICEF. (2015). *Progress For Children 2015*. New York: UNICEF.
- UNICEF Innocenti Research Centre. (n.d.). *Early Marriage Child Spouses*. Florence, Italy: UNICEF.